



Persiapan Pilkada Serentak Belum Tuntas

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak masih belum siap digelar. Dari audit kesiapan pilkada, BPK menyimpulkan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia, termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur, belum dapat mendukung seluruh penyelenggaraan pemilihan di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.

“Audit yang kami lakukan adalah audit kesiapan. Gambaran apa yang terjadi di lapangan dan temuan-temuannya,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis setelah menyampaikan laporan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

BPK memaparkan sepuluh poin temuannya kepada Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fadli Zon. Pimpinan Komisi Pemerintahan DPR dan Komisi Hukum DPR juga hadir dalam pertemuan terbuka tersebut.

Harry mengatakan audit dilakukan sejak 8 Juni lalu. Targetnya ialah seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada, antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, serta Mahkamah Konstitusi.

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, dalam pemaparannya, mencontohkan masih ada dua kabupaten yang belum menyediakan biaya pengawasan pilkada. Adapun biaya pengamanan belum cair di 1 provinsi,

18 kabupaten, dan 6 kota. Menurut dia, total anggaran pengamanan pilkada mencapai Rp 1,14 triliun. “Tapi baru cair 52 persen per 2 Juli 2015,” kata Agung.

Agung menyerahkan sepenuhnya keputusan politik yang akan diambil dari hasil audit ini kepada DPR dan pemerintah. “Kami tidak dalam posisi memberi penilaian apakah pilkada harus ditunda atau tidak,” ujarnya. “Tapi agar temuan-temuan ini membuka ruang evaluasi.”

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai temuan BPK ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap menyelenggarakan pilkada serentak. “Kami ingin pilkada berjalan dengan bagus. Tapi dari audit kinerja, ternyata masih banyak hal belum siap,” ujar dia.

Ketua Komisi Pemerintahan DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan kepercayaan komisinya terhadap KPU semakin menurun. “Semangat kita menyelenggarakan pilkada ini harus tetap ada,” ujarnya. “Tapi penyelenggaraannya sendiri tidak konsisten.”

Rambe mengatakan DPR akan menyampaikan temuan BPK kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi. Dalam pertemuan tersebut, Rambe berencana ingin blakblakan di depan Jokowi. “Kalau saya diajak pimpinan ketemu dengan Presiden, maka saya sampaikan ini: pilkada belum siap,” kata dia.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengapresiasi audit BPK dalam mengawal persiapan pilkada. Menurut dia, KPU tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelenggarakan pilkada. Dia mencontohkan penganggaran

pilkada tak lepas dari peran Kementerian Dalam Negeri. Adapun untuk ketersediaan sumber daya manusia, “Kami mengakui masih perlu optimalisasi,” ujarnya.

● **INDRI MAULIDAR | MAHARDIKA | AGOENG WIJAYA**

Mediasi ala Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali muncul sebagai penengah. Kali ini Kalla menjadi “juru damai” untuk persoalan pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember nanti. Kemarin malam, Kalla menggelar pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum dan sejumlah ketua umum partai politik di rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, selepas tarawih.

“Pertemuan untuk membahas adanya partai bersengketa yang ingin ikut pemilihan kepala daerah serentak,” kata Kalla di kantornya sebelum pertemuan, kemarin. Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang terancam gagal mengikuti pilkada karena masih dibelit dualisme kepengurusan.

Kalla mengatakan pertemuan melibatkan Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Ancol, Agung Laksono. Dia juga mengundang Ketua Umum PPP versi Mukhtar Surabaya, M. Romahurmuzyi, dan Ketua Umum PPP versi Mukhtar Jakarta, Djan Faridz.

● **REZA ADITYA | INDRI MAULIDAR**